

Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI) Tahun 2020 – 2024

A. Latar Belakang

Pada 29 Agustus 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendeklarasikan Keterbukaan Parlemen Indonesia/*Open Parliament Indonesia* (OPI) sebagai bagian dari inisiatif Open Parliament. Kehadiran OPI melengkapi partisipasi DPR RI dalam berbagai kancah internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), dan Open Parliament e-Network (OPeN).

Melalui OPI, DPR RI berkomitmen untuk terbuka kepada masyarakat. Inisiatif ini juga mengutamakan proses ko-kreasi antara Parlemen dengan berbagai elemen masyarakat yakni Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Internasional (OI), Organisasi Non Pemerintah (NGO), Lembaga Internasional dan Akademisi untuk bersama-sama menyusun berbagai komitmen dan program mendorong keterbukaan parlemen.

Pada 2020, OPI juga selaras dan kontekstual dengan upaya DPR RI dalam mengembangkan "**Parlemen Modern**" melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam proses legislasi dan kegiatan parlemen lainnya. Pimpinan DPR telah mewacanakan **e-parliament** atau **digital parlemen** sebagai salah satu agenda yang diusung untuk meningkatkan kinerja Parlemen. Medio 2020, DPR menerbitkan **Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK)** sebagai upaya membangun dan mengelola data dan informasi parlemen dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi sehingga penggunaannya semakin optimal.

Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan partisipasi dan informasi telah mulai mapan dengan dibentuknya pelayanan informasi satu pintu pada PPID DPR RI (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), publikasi informasi legislasi pada Sistem Informasi Legislasi (SILEG), partisipasi pada Rumah Aspirasi, dan komplain. DPR juga telah mengembangkan berbagai platform repositori dokumen terdahulu seperti arsip, repositori DPR, dan perpustakaan.

Di masa yang akan datang, OPI strategis dalam mendukung dan memperkuat berbagai sistem dan program-program yang berkaitan dengan keterbukaan parlemen. Pada tahun yang bersamaan dengan deklarasi OPI, DPR RI telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia (OPI) pertama untuk periode 2018-2020 yang berisikan lima komitmen parlemen untuk mendorong keterbukaan. RAN OPI dikeluarkan setiap dua tahun dan merupakan kewajiban kepada masyarakat serta dikumpulkan kepada OGP dan jaringannya.

Sebagai upaya parlemen Indonesia untuk terus bisa menghasilkan komitmen-komitmen rencana aksi yang tajam, ambisius dan selaras dengan kebutuhan dan rencana strategis DPR RI, maka diperlukan sebuah Peta Jalan / *Roadmap* yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas komitmen dalam RAN OPI. Penyusunan Roadmap Open Parliament Indonesia (OPI) 2020-2024 sudah dimasukkan sebagai salah satu komitmen

dalam RAN OPI 2018-2020. Roadmap OPI 2020-2024 disusun setiap tahapannya, melalui proses ko-kreasi antara DPR RI dan CSO diantaranya:

1. Pengadaan Baseline Survey Masyarakat,
2. Asesmen mengenai enabling environment dan penyusunan dokumen melalui berbagai pertemuan diskusi dan lokakarya antara CSO dan Unit Kerja DPR RI dan
3. Pengesahan dokumen oleh pimpinan Tim OPI dari Anggota DPR RI.

Pada bulan Juli - Agustus 2020, Sekretariat OPI telah melakukan Baseline Survey Peta Jalan Open Parliament Indonesia 2020 - 2024. Survei ini dilakukan melalui media online yang menargetkan masyarakat umum di seluruh Indonesia. Hasil survei Open Parliament Indonesia yang menjelaskan mengenai bagaimana tingginya kebutuhan publik pada akses informasi dan saluran partisipasi publik di Parlemen. Ini yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan strategis pada Roadmap OPI 2020-2024.

B. Konteks Roadmap 2020-2024

Inisiatif Open Parliament embrionya muncul sejak 2012 dalam "*Declaration on Parliamentary Openness*". Didukung oleh 180 organisasi dari 82 negara, dalam deklarasi tersebut, secara garis besar terdapat 4 isu utama yang didorong untuk mewujudkan parlemen yang terbuka, yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat

Publik seharusnya dapat berpartisipasi langsung dalam proses legislasi, pengawasan dan penganggaran di DPR supaya kesenjangan antara konstituen dan DPR dapat dikurangi. Keterlibatan ini dapat diwujudkan dengan cara:

- a. membuka persidangan, menyiarkannya dan mempublikasikan dokumen hasil persidangan tersebut.
- b. mempublikasikan dokumen-dokumen draf kebijakan dan memungkinkan publik untuk memberikan komentar dan berdiskusi secara daring
- c. membuka pelayanan informasi dan pelayanan lainnya yang lebih bisa diakses dan mampu menerima partisipasi masyarakat
- d. menyediakan waktu sidang yang membahas aspirasi tertulis dari masyarakat pada setiap komisi
- e. menyediakan petisi bagi masyarakat untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap satu usulan kebijakan tertentu.

2. Akses Informasi Publik

Sebagai lembaga yang menyusun dan membahas kebijakan, produk utama DPR adalah informasi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia sudah menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik (14/2008) dan UU Pelayanan Publik (25/2009). Kedua UU tersebut memberi panduan bagi DPR untuk pengelolaan dan pelayanan informasi. Saat ini DPR telah memiliki struktur utama yang menggerakkan pelayanan informasi, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berserta sejumlah perangkat utamanya. Melalui struktur PPID ini juga berbagai publikasi dokumen dan informasi dapat dilakukan

dan dipantau secara langsung. Hal yang dapat dilakukan untuk membuka akses berupa dapat berupa:

- a. Membuka data dan informasi dalam format *open data*
- b. Proaktif untuk merilis informasi publik
- c. Membangun mekanisme hukum dan peraturan untuk memperkuat hak atas informasi publik

3. Teknologi dan Inovasi

Tujuan dari penggunaan teknologi informasi agar publik semakin mudah mengakses informasi di DPR. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hingga 2020 terdapat 196 juta pengguna internet. Ini merupakan kesempatan bagi DPR untuk meningkatkan keterlibatan dan akses informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a) mengoptimalkan website untuk meningkatkan publikasi dokumen secara lebih proaktif
- b) meningkatkan teknologi informasi interaktif dua arah
- c) penguatan infrastruktur dan sumberdaya pelayanan informasi publik dan teknologi informasi
- d) penerbitan aplikasi-aplikasi yang memudahkan konstituen untuk mengakses kegiatan dan dokumen DPR.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas politik diperlukan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap parlemen. Untuk mewujudkan ini beberapa hal dapat dilakukan: (a) membentuk forum dialog DPR/Anggota DPR-Konstituen, dengan masyarakat untuk membahas isu-isu seputar pelaksanaan tugas dan fungsi DPR (b) membentuk tim internal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan parlemen berjalan dengan baik.

*

Secara tradisional, DPR telah menerjemahkan berbagai prinsip tersebut dalam keseharian. DPR telah mengembangkan berbagai mekanisme dan sejumlah program yang berkontribusi langsung terhadap sejumlah nilai-nilai di atas (lihat tabel). Meskipun, selalu ada pertanyaan yang perlu dijawab, apakah berbagai mekanisme dan program tersebut telah terkoneksi dengan publik secara maksimal?

Tabel 1. Existing Mekanisme dan Program DPR terkait Keterbukaan Parlemen

Aspek	Kelembagaan	Legislasi	Pengawasan	Penganggaran
Prinsip				
Keterlibatan Publik/ Partisipasi	RDPU Kunker Reses	RDPU Kunker Reses	RDPU Kunker Reses	RDPU Kunker Reses

Akses Informasi Publik/Transparansi	e-PPID	SILEG	website DPR	website DPR
Akuntabilitas	Laporan Kinerja DPR	Evaluasi Prolegnas (Baleg)	Laporan Kinerja DPR	Laporan Kinerja DPR
Teknologi dan inovasi	e-PPID rumah aspirasi kanal pengaduan	SILEG	website DPR	website DPR

Baseline Survei Peta Jalan OPI menemukannya fakta bahwa mayoritas responden mendapatkan informasi mengenai DPR RI dari sumber eksternal, yakni Media Massa Daring sebanyak 26,54%, Media Massa Cetak 13,71%, Televisi dan/atau Radio sebanyak 13,71%, Publikasi Akademis 6,69% dan Media Sosial Pribadi 5,7%. Hanya 17,76% responden yang menyatakan memperoleh informasi mengenai DPR dari sumbernya langsung, yaitu website DPR RI.

Pada aspek partisipasi, hanya 5,08% responden yang terinformasi mengenai partisipasi di DPR RI. Penilaian responden terhadap kinerja DPR RI dalam mengakomodasi partisipasi dan aspirasi masyarakat dinilai mayoritas Sangat Buruk (34,8%) dan Buruk 46,34%. Hanya 17,8% menilai baik dan 1% menilai sangat baik. (Hasil survei dilampirkan)

Temuan survei di atas pada aspek transparansi dan partisipasi memotret bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI belum mampu menjangkau secara maksimal kepada masyarakat. Situasi ini perlu dijawab. Open Parliament Indonesia hadir dalam rangka untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena dalam platform Open Parliament Indonesia terdapat mekanisme penyusunan Rencana Aksi Nasional dan ko-kreasi, atau pendampingan dari masyarakat sipil. Hadirnya masyarakat sipil, selain membantu memberikan perspektif publik, juga membuka peluang inisiasi-inisiasi dengan tujuan partisipasi publik. Adanya Roadmap akan memberikan panduan yang lebih jelas untuk menjangkau publik yang lebih luas.

C. Visi Perubahan

Mewujudkan parlemen yang lebih responsif, terbuka, partisipatif dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

(Parlemen: DPR, Anggota DPR dan sekretariat atau sistem pendukung. Responsif artinya, DPR memiliki kapasitas dan kualitas: respon merespon yang dengan cepat dan profesional terhadap aspirasi publik. Terbuka, artinya seluruh : kegiatan dan dokumen dapat diakses oleh publik. Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanyakan oleh publik.

Berbasis TIK: menggunakan teknologi informasi dan internet)

D. Target Perubahan 2020-2024

untuk perubahan

Roadmap Open Parliament Indonesia 2020-2024 ini merupakan panduan pelaksanaan NAP OPI. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan pada tahun berjalan. Berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang diharapkan akan terjadi pada 2024.

Target Perubahan 1: Pada 2024 publik dapat mengakses seluruh kegiatan parlemen, selain yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

Situasi yang diharapkan akan terwujud:

- publik dapat mengakses seluruh kegiatan DPR secara online melalui kanal khusus yang disediakan oleh DPR.
- publik dapat mengakses seluruh dokumen DPR yang dinyatakan terbuka berdasarkan undang-undang, dengan cara mudah, murah, "up to date" dan dalam format open data.
- secara internal, DPR memiliki sistem yang menjamin ketersediaan data dalam format digital yang dapat digunakan oleh Anggota DPR dan Sistem Pendukung.

Aksi-aksi utama

2021

- Peningkatan fungsi pelayanan informasi dan partisipasi pada Sistem Informasi Legislasi (SILEG). Peningkatan ini dilakukan melalui penyediaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penyusunan standar kerja, dan penyusunan standar dokumen dan informasi dalam aplikasi SILEG.
- Penguatan akses informasi digital dengan cara:
 - penyediaan informasi digital melalui pengembangan Big Data Parlemen yang meliputi: infrastruktur, pengembangan Pusat Data dan Video Parlemen/*Parliamentary Data and Video Network/PDVN*)
 - mempermudah akses informasi proaktif melalui redesain Website DPR yang meliputi: menu, tata letak, disain, dan sebagainya.
 - Penyediaan informasi risalah persidangan dengan cara penguatan Unit Risalah yang meliputi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Infrastruktur, dan tata kerja.
- Peningkatan akses publik terhadap informasi DPR melalui Revisi Peraturan DPR 1/2010 dan sejumlah peraturan terkait.

2022

- Penguatan akses informasi digital dengan cara penyediaan informasi digital melalui pengembangan Big Data Parlemen yang meliputi aspek: standar kerja tata kelola data.

2023

- Penguatan akses informasi terfokus pada pelaksanaan fungsi parlemen, yaitu:
 - pengembangan Sistem Informasi Anggaran yang memuat beranekaragam informasi Anggaran yang sedang dibahas antara DPR dengan Pemerintah.
 - Sistem Informasi Pengawasan yang memuat berbagai informasi pengawasan yang dilakukan oleh seluruh komisi di DPR.

- Sistem Informasi *Fit and Proper Test* calon pejabat publik yang memuat informasi tentang fit and proper test calon pejabat publik di DPR, mulai dari profil, proses hingga hasil dan respon publik.
- Penguatan akses informasi digital dengan cara penyediaan informasi digital melalui pengembangan Big Data Parlemen yang meliputi aspek: interoperabilitas.

2024

- Peningkatan akses publik terhadap informasi parlemen melalui penguatan jaringan TV Parlemen dan Radio Parlemen yang meliputi perbaikan pada aspek: konten, desain dan regulasi.

Target Perubahan 2 - Pada 2024 publik mudah mengakses ruang partisipasi dalam pembahasan kebijakan legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Situasi yang diharapkan akan terwujud:

- publik dapat mengajukan diri terlibat dalam pembahasan kebijakan yang sedang berlangsung di DPR melalui mekanisme pengajuan diri untuk berpartisipasi.
- publik dapat mengetahui dan menggunakan kanal-kanal proaktif untuk terlibat dalam proses kebijakan.
- secara internal, DPR memiliki sistem yang menjamin penanganan aspirasi dan partisipasi publik.

Aksi-aksi utama

2021

- Penguatan respon DPR terhadap partisipasi publik dalam proses kebijakan melalui:
 - Public Need Assessment pengelolaan partisipasi di DPR
 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dalam respon keluhan, aspirasi dan permintaan publik
 - Pengembangan *Call Center DPR (feasibilitas study)*
- Media engagement dengan kampanye dan kegiatan data driven journalism
- Forum Dialog Kebijakan Legislasi

2022

- Penguatan respon DPR terhadap partisipasi publik dalam proses kebijakan melalui:
 - Pengemangan buku panduan keterlibatan pemangku kepentingan bagi Anggota DPR
- Penguatan akses partisipasi publik secara online dengan:
 - Pengembangan kanal E-Reses dimana dalam kanal tersebut, masyarakat dapat memantau dan memperoleh informasi mengenai reses dan cara berpartisipasi dalam reses.
 - Pengembangan kanal E-RDPU dimana dalam kanal e-RDPU masyarakat dapat mengajukan diri untuk diundang dalam RDPU.
- Kampanye Open Parliament Indonesia ke media, jurnalis dan publik.

2023

- Perluasan partisipasi publik melalui pengembangan basis data pemangku kepentingan berbasis isu sektoral.
- Kampanye Open Parliament Indonesia ke media, jurnalis dan publik.

2024

- Kampanye Open Parliament Indonesia ke media, jurnalis dan publik.

Target Perubahan 3: Pada 2024 konstituen mudah mengakses informasi dan ruang partisipasi Anggota DPR RI, terutama di daerah pemilihan.

Situasi yang diharapkan terwujud:

- publik dapat mengetahui profil dan menelusuri kinerja Anggota DPR.
- publik dapat mengajukan diri untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan Anggota DPR yang melibatkan konstituen.
- secara internal DPR memiliki sistem untuk mengelola informasi dan partisipasi untuk Anggota DPR RI.

Aksi-aksi utama

2021

- Penyediaan sistem informasi berbasis Anggota DPR “Sistem Informasi Anggota Parlemen/SIAP”. Penyediaan ini meliputi: informasi, tenaga pendukung, standar kerja tenaga pendukung, dan kanal partisipasi publik.
- Standar publikasi informasi untuk DPR yang dapat meningkatkan interaksi Anggota DPR-konstituen di daerah pemilihan.

2022

- Peer Learning Forum(s) antar Anggota DPR dalam kaitannya dengan hubungan konstituen.
- Penguatan kapasitas staf anggota dalam peningkatan informasi anggota baik di Dapil dan di DPR

2023

- Penyusunan mekanisme interaksi dan partisipasi publik di Rumah Aspirasi (*feedback loop*, dan lainnya)

2024

Target Perubahan 4: Pada 2024 engagement antara DPR dengan Masyarakat Sipil dalam Open Parliament Indonesia telah berjalan sebagai sebuah kebiasaan baru.

Situasi yang diharapkan terwujud:

- masyarakat sipil dapat memberikan masukan yang berkualitas terkait tata kelola parlemen yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

- secara internal DPR memiliki sistem tata kelola Open Parliament Indonesia secara lebih berkelanjutan.

Aksi-aksi utama

2021

- Penguatan Kelembagaan Unit Pendukung (Sekretariat) OPI dengan penguatan kapasitas.
- Pengembangan sekretariat OPI dari masyarakat sipil.

2022

- Penyusunan mekanisme tata kelola kolaborasi Tim OPI (Pimpinan dan Anggota DPR), Sekretariat OPI dan Masyarakat Sipil.

2023

-

2024

- Evaluasi Dampak terhadap implementasi OPI 2018-2024.